

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan Organisasi Internasional yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan 51 negara sebagai anggota pendiri dan 192 negara sebagai anggota. PBB memiliki empat tujuan, yaitu untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa, untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah Internasional dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan untuk menjadi pusat harmonisasi tindakan negara.¹ Dalam menjalankan keempat tujuan tersebut, PBB menyediakan sarana untuk membantu menyelesaikannya konflik internasional dan merumuskan kebijakan, seperti menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan konflik internasional, merekomendasikan metode dan ketentuan penyelesaian, merekomendasikan tindakan terhadap ancaman atau tindakan agresi apapun, dan merekomendasikan kepada Majelis Umum yang harus ditunjuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.²

PBB sebagai Organisasi Internasional, memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal menangani situasi konflik, PBB memiliki “*flagship enterprise*” bernama *UN peacekeeping operations* (UN PKO

¹ Department of Public Information. 2008. *Everything You Always Wanted to Know About the United Nations*. New York. Page: 1.

² *Ibid*

atau Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) yang berada di bawah wewenang Dewan Keamanan.³ OP PBB pertama kali dilakukan pada tahun 1948 dimana DK PBB mengirimkan pasukan pengamat militer PBB ke Timur Tengah yang disebut dengan misi *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO). Tugas misi tersebut adalah untuk memantau Kesepakatan Gencatan Senjata antara Israel dan Lebanon. Setelah UNTSO, PBB mengadakan misi perdamaian kembali yaitu *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) pada tahun 1949 dan *First UN Emergency Force* (UNEF1) tahun 1956.⁴

Sejalan dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, salah satu contoh kasus yang membutuhkan PKO antara lain UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*), yaitu badan organisasi yang didirikan oleh PBB pada tanggal 19 Maret 1978, berdasarkan resolusi DK PBB nomor 425 dan 426, guna menangani konflik yang terjadi di Lebanon, memastikan gerak mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional, dan membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan efektivitas kekuasaan.⁵

PKO masa sekarang menjadi alat penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia maupun internasional.⁶ Salah satu contoh dari PKO yang melibatkan KONGA yaitu keterlibatannya dengan UNIFIL di Lebanon. Berbagai upaya

³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019 [online] *Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*. <https://kemlu.go.id/portal/i/read/91/view/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb> diakses 06 September 2019

⁴ Roser, max & M. Nagdy. 2015 [online] *International Peacekeeping Operations*. <https://ourworldindata.org/peacekeeping> diakses 06 September 2019

⁵ United Nations. 1970-1978 [online] *Extracts relating to Article 98 of the Charter of the United Nations: Supplement No 5*. Pg: 275-279. <http://www.globalissues.org/print/article/664> diakses pada tanggal 08 September 2019

⁶ *Ibid*

mediasi dari pihak ketiga khususnya Liga Arab yang mengusahakan gencatan senjata diantara pihak-pihak yang bertikai di Lebanon pun telah dilakukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bahkan DK PBB telah membuat berbagai resolusi sejak awal terjadinya konflik di negara tersebut, namun terdapat hambatan dalam pembubaran pasukan Hizbullah.

Dampak dari konflik 34 hari yang terjadi antara kelompok Hizbullah dengan Israel membuat PBB telah menugaskan DK PBB untuk membentuk suatu organisasi yang disebut UNIFIL (*United Nation Interim Force in Lebanon*) yang merupakan badan organisasi yang dibentuk PBB pada tanggal 19 Maret 1978. Pasukan Multinasional dari berbagai satuan mulai dikirim menuju Lebanon Selatan untuk menjaga daerah-daerah perbatasan yang dianggap rawan konflik, terutama konflik yang kembali terjadi antara pasukan Hizbullah (Lebanon) dengan negara Israel pada tahun 2006.⁷ Pasukan Multinasional dari berbagai satuan-satuan mulai dikirim menuju Lebanon Selatan, untuk menjaga daerah-daerah perbatasan yang dianggap rawan konflik. UNIFIL juga berperan aktif dalam membantu masyarakat Lebanon baik dalam bidang sosial dan kesejahteraan serta kesehatan.

Disamping itu, KONGA dikirim untuk ikut serta dalam mewujudkan misi perdamaian PBB dan berperan aktif dalam pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dunia, sehingga menimbulkan kepercayaan dunia internasional terhadap negara Indonesia, terutama dari PBB. Hal ini menunjukkan bahwa

⁷Shah, Anup. 2006. [online]. Crisis In Lebanon 2006. <http://www.globalissues.org/print/article/664> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

Indonesia ikut berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian di beberapa misi dalam naungan PBB.

Gambar 1.1. Peta Lebanon Selatan⁸



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Indonesia turut berkontribusi dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan pada tahun 2006-2010?

⁸ Shah, Anup. 2006. [online]. Crisis In Lebanon 2006. <http://www.globalissues.org/print/article/664> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama, untuk menjadi mediator atau penengah bagi pasukan Hizbullah dan Israel guna mencapai perdamaian dan gencatan senjata di Lebanon Selatan. Kedua ialah untuk mengetahui kinerja pasukan misi perdamaian Kontingen Garuda (KONGA) selama mengikuti misi UNIFIL di Lebanon Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan penjelasan yang kongkrit terkait kontribusi Indonesia melalui Kontingen Garuda (KONGA) dalam misi perdamaian UNIFIL untuk mencapai perdamaian dan gencatan senjata di Lebanon Selatan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar penelitian selanjutnya khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian

1.5.1. Level of Analysis

Menurut John T. Rourke *level of analysis* meliputi *individual-level analysis* yaitu pengaruh seseorang sebagai individu atau sebagai spesies dalam membuat kebijakan. *State-level analysis* yaitu bagaimana organisasi dan pengoperasian pemerintah mempengaruhi kebijakan dan *system-level analysis* yaitu realita dan tekanan eksternal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara.⁹

⁹ John T. Rourke. 2009. *Level Of Analysis and Foreign Policy in International Politics On the World stage*. New York: Palgrave Macmillan. Hal: 65.

Analisis tingkat negara (*state-level analysis*) mengasumsikan bahwa karena negara adalah pelaku internasional yang paling penting, dunia politik dapat dipahami dengan berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh struktur politik negara, para aktor pembuat kebijakan, dan interaksi antara kebijakan para aktor. Kebijakan luar negeri tidak dirumuskan dengan proses pengambilan keputusan tunggal sebaliknya, sifat yang tepat dari proses yang berubah sesuai dengan sejumlah variabel, termasuk jenis sistem politik, jenis situasi, jenis masalah, dan faktor-faktor internal yang terlibat. Negara adalah organisasi yang kompleks, dan internal mereka, atau domestik, dinamikanya mempengaruhi tindakan internasional mereka.¹⁰ Satu set faktor internal berpusat pada dampak pembuatan kebijakan dari berbagai pelaku pembuatan kebijakan luar negeri dalam hal ini termasuk para pemimpin politik, organisasi, birokrasi, legislatif, partai politik dan oposisi, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat.

Masing-masing tingkatan analisis mempengaruhi kebijakan luar negeri ini, tetapi pengaruh mereka bervariasi sesuai dengan jenis pemerintahan, situasi, dan kebijakan yang dipermasalahkan, biasanya kepala pemerintahan adalah yang paling besar sebagai pelaku pembuatan kebijakan luar negeri yang berkuasa birokratis organisasi biasanya aktor paling kuat kedua.¹¹ Agar sebuah kebijakan berhasil, negara biasanya harus membuat pilihan-pilihan kebijakan dalam konteks realitas di sistem internasional. Analisis sistem tingkat (*system-level analysis*)

¹⁰ *Ibid.* Hal: 79-89.

¹¹ *Ibid.* Hal. 91-97

meneliti bagaimana realitas sistem internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri. Banyak faktor yang menentukan sifat sistem tertentu. Faktor sistemik termasuk karakteristik strukturalnya, hubungan kekuasaan, realitas ekonomi, dan norma-norma perilaku.¹²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tingkatan *state-level analysis*. Karena penulis akan membahas tentang kepentingan nasional negara dan kebijakan luar negeri yang dibuat *state-level analysis* di atas.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang terjadi selama aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara. Kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah keinginan sebuah negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.¹³ Konsep kepentingan nasional biasanya digunakan dalam dua cara, yaitu, yang pertama kepentingan nasional yang menyiratkan kebutuhan yang memiliki *standart* dari sebuah negara. Kedua, kepentingan nasional yang di gunakan untuk menggambarkan dan mendukung kebijakan tertentu.¹⁴

¹² *Ibid.* Hal. 97

¹³ Binus University. 2012. [online] *International Relation: Hans Morgenthau dan Political Realism*. <http://www.cultural-china.com/chinaWH/html/en/History358bye989.html> di akses pada tanggal 12 April 2018

¹⁴ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan. 1999. *Fifty Thinkers In International Relation*. London, U.K., Routledge. Hlm.203-205.

Menurut Holsti, kepentingan nasional sering digunakan untuk menunjukkan serta menganalisa tujuan nasional suatu negara.¹⁵ Kepentingan nasional (*national interest*) pada setiap negara memiliki banyak macam cara serta tujuannya, yang tidak lain diperuntukan bagi keuntungan negara. Karena setiap kepentingan nasional setiap negara memiliki perbedaan, biasanya hal ini berkaitan dengan kebijakan negara dan juga nilai-nilai kebangsaan yang dianut oleh negara tersebut. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi kepentingan nasional sebuah negara, yaitu, nilai kebangsaan, letak geografis dan sejarah. Tujuan dari adanya sebuah kepentingan nasional pada suatu negara mengkonsepsikan bahwa negara tersebut merupakan sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kebijakan yang dianut serta dilegalkan, hal ini juga menunjukan bahwa tujuan dari adanya kepentingan nasional bukanlah upaya mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara, namun sebaliknya, kepentingan nasional lebih kepada kemajuan suatu negara dalam berbagai aspek serta perlindungannya terhadap sebuah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau yang biasa disingkat dengan ATHG. Ketika melakukan interaksi dengan dunia internasional, setiap negara pasti membawa misi masing-masing dan dalam kepentingan nasional, negara membawa visi dan misi bagaimana kepentingan nasional negara mendapat bantuan agar dapat terkordinasi dan tercapai dalam jangkauan waktu yang efisien.¹⁶

¹⁵ Holsti, KJ. 1987. Politik Internasional: Kerangka Analisa. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. Hal: 177-195.

¹⁶*Ibid*, hal – 21

Dapat disimpulkan dari definisi para ahli bahwa kepentingan nasional adalah keinginan yang dimiliki oleh sebuah negara, dimana keinginan tersebut dihasilkan dari adanya pengambilan kebijakan oleh pemimpin negara atau pihak pemerintah. Karena adanya kepentingan nasional tersebut negara memiliki tujuan untuk menjadi mediator dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian bagi negara yang berkonflik.

1.5.2.2. *Peacekeeping Operations*

Menurut J. Michael Greig dan Paul F. Diehl, pemeliharaan perdamaian (*Peacekeeping*) telah menjadi alat yang semakin menonjol yang digunakan oleh komunitas internasional untuk mempromosikan manajemen dan penyelesaian konflik.¹⁷ Menurut PBB *peacekeeping* adalah teknik yang dirancang untuk memelihara perdamaian pada saat konflik mereda dan untuk membantu implementasi perjanjian yang disepakati oleh para pembuat perdamaian serta menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi.¹⁸ Efek dari pemeliharaan perdamaian dalam jangka pendek adalah membatasi jumlah kekerasan, tetapi juga menemukan bukti yang jelas bahwa konflik yang lebih sedikit kekerasan lebih mudah untuk berakhir secara meyakinkan beberapa tahun ke depan.¹⁹ Semakin banyak yang bersedia yang dikirim oleh PBB untuk misi pemeliharaan perdamaian, maka semakin banyak misi yang diberikan mandat yang kuat, semakin besar efek pengurangan konflik.

¹⁷ Greig, J. Michael and Paul F. Diehl. 2005. The Peacekeeping-Peacemaking Dilemma. *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 4. Page: 621-645.

¹⁸ 'What Is Peacekeeping?', *United Nations Peacekeeping*, <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml> di akses pada 09 May 2019.

¹⁹ *Ibid.*

Peacekeeping adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personal militer, polisi PBB, dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata.²⁰ Cara ini adalah suatu teknik yang ditempuh untuk mencegah konflik maupun untuk menciptakan perdamaian.²¹

Peacekeeping operations telah berkembang dari model tradisional yang mengobservasi gencatan senjata dan pemisahan pasukan setelah perang antar negara ke arah yang lebih kompleks dengan melibatkan berbagai pihak, di antaranya militer, polisi dan sipil. Studi *Peacekeeping* sebagian besar merupakan perawatan deskriptif untuk operasi penjaga perdamaian tunggal. Analisis sistematis pertama berfokus pada kemampuan operasi pemeliharaan perdamaian untuk mencegah pembaruan konflik bersenjata. Pemeliharaan perdamaian dinilai berhasil jika mandat dipenuhi dan / atau perang tidak semakin meningkat atau konflik kekerasan dipegang pada tingkat rendah setelah pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Sebagian besar operasi penjaga perdamaian memiliki keterbatasan konflik bersenjata sebagai salah satu tujuan utama mereka. Jika mereka berhasil mencegah peningkatan konflik, operasi pemeliharaan perdamaian menciptakan lingkungan dimana para pihak yang berselisish lebih terbuka untuk inisiatif diplomatik dan menyelesaikan perbedaan mereka.²²

²⁰ Jimenez De Arechaga, Eduardo. 1983. *United Nations Security Council* dalam : R. Bernhardt (Ed). *Encyclopedia of Public International Law* Instalment 5. Hlm. 346.

²¹ *Ibid.* hal: 347.

²² *Ibid*

Penjaga Perdamaian menciptakan lingkungan untuk masyarakat agar tidak saling membunuh dan oleh karena itu memberikan kesempatan bagi orang untuk membicarakan beberapa masalah karena konflik dengan cara mediasi. Tanpa operasi pemeliharaan perdamaian akan sangat sulit bagi strategi perdamaian lainnya untuk bekerja, walaupun pemeliharaan perdamaian dengan sendirinya tidak untuk menyelesaikan konflik, karena yang di lakukan dengan adanya pemeliharaan perdamaian adalah untuk mengurangi kekerasan, dan menciptakan kondisi sehingga hal-hal lain dapat terjadi.²³

Sementara operasi pemeliharaan perdamaian terus menjadi komponen penting dalam penciptaan perdamaian yang tahan lama, strategi baru dan dampak yang terbukti dari proyek-proyek pemeliharaan perdamaian non-kekerasan yang ada menunjukkan bahwa itu adalah metode yang layak dan berguna yang dapat digunakan dalam intervensi.²⁴

Meskipun pasukan penjaga perdamaian militer dalam intervensi melakukan hal yang baik dan dapat memperbaiki situasi, mungkin ada cara yang lebih untuk melakukannya dengan menggunakan strategi non-kekerasan . Keduanya bukan alternatif langsung, tetapi ketika penjaga perdamaian non-kekerasan dapat digunakan, itu dapat mengurangi beberapa aspek negatif dari pemeliharaan perdamaian militer dan berkontribusi untuk meningkatkan kolaborasi.

²³ Schweitzer, Christine. 2010. A Barely Tapped Ressource “Civilian Peacekeeping”. Sozio-Publishing. Pg: 25.

²⁴ *Ibid*

1.5.2.3. Mediator

Menurut Douglas, mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa di mana dalam sosok netral, sedangkan mediator, membantu para pihak berkomunikasi satu sama lain, bertukar pikiran masalah, dan menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri untuk sengketa mereka. Dengan sifatnya yang informal, mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dengan menyerahkan masalahnya kepada pihak-pihak terkait, dan bukan kepada individu lain. Ini adalah karakter yang memengaruhi banyak kepentingan mediasi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa mengundang masalah lain.²⁵

Menurut Jay Folberg dan Alison Taylor, mediasi dapat di definisikan sebagai proses dimana pihak yang bertikai menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri dengan bantuan yang tidak memihak. Secara sistematis mengisolasi masalah yang disengketakan untuk menghasilkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.²⁶

Mediator dapat memberikan informasi tentang proses, mengangkat masalah dan membantu para pihak mengeksplorasi opsi. Primer dari mediator adalah untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara sukarela. Prinsip mediator harus membantu para pihak untuk terlibat dalam proses penentuan nasib sendiri. Integrasi Mediator harus bertindak dengan integritas sehubungan dengan

²⁵ Noll, Douglas E. 2001. A Theory of Mediation *Dispute Resolution Journal*. Pg : 78.

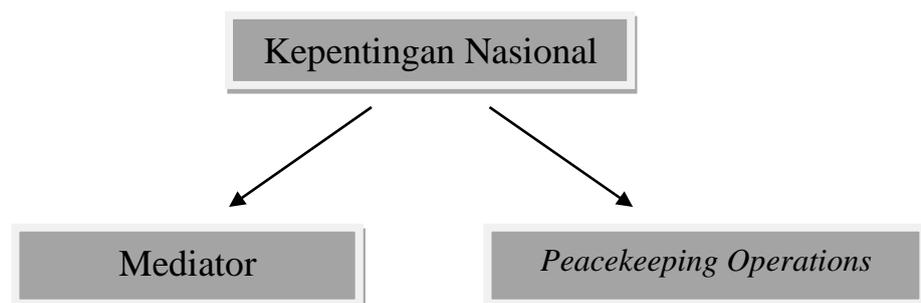
²⁶ Folberg, Jay and Alison Taylor. *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation*. San Francisco: Jossey-Bass. Pg: 7.

semua aspek proses mediasi dan terhadap semua pengguna proses. Kata integritas mencakup ketidakberpihakan, kompetensi, kerahasiaan, transparansi, keadilan, kesukarelaan, tugas berkelanjutan untuk mengungkapkan, tugas berkelanjutan untuk membahas, pengungkap, dan hasil yang tahan lama. Jika suatu saat mediator tidak dapat melakukan proses dengan cara yang tidak memihak, mediator berkewajiban untuk menarik diri.²⁷

Mediator dapat berbentuk negara, organisasi internasional, atau individu yang ikut serta secara aktif dalam proses negoisasi. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.²⁸

1.5.3. Sintesa Pemikiran

Tabel 1.2. Kerangka Pemikiran



²⁷ Smith, Craig R. *Mediation: The Process and the Issues*. 1998. Page: 9 – 10.

²⁸ W. Poeggel and E. Oeser, *op.cit.*, hlm 515.

Dalam sintesa pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa, kepentingan nasional memiliki tujuan, salah satunya sebagai mediator dan memiliki cara dengan mengirimkan pasukan perdamaian (*Peacekeeping Operations*).

1.6. Hipotesa

Dengan menganalisis Tabel 1.2. maka dapat ditarik hipotesa bahwa, pada tahun 2006-2010 kepentingan nasional negara Republik Indonesia bertujuan mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia yang tidak hanya menjalankan misi *peacekeeping operations* dengan mengirimkan Kontingen Garuda untuk bergabung dalam UNIFIL, tetapi juga menjadi mediator bagi negara Lebanon dan Israel yang berkonflik, guna untuk mencapai perdamaian dan mencapai gencatan senjata antara kedua belah pihak.

1.7. Metodologi Pemikiran

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1.1 *Peacekeeping Operations*

Menurut J. Michael Greig dan Paul F. Diehl, pemeliharaan perdamaian (*Peacekeeping*) telah menjadi alat yang semakin menonjol yang digunakan oleh komunitas internasional untuk mempromosikan manajemen dan penyelesaian konflik.²⁹ Menurut PBB *peacekeeping* adalah teknik yang dirancang untuk memelihara perdamaian pada saat konflik mereda dan untuk membantu implementasi perjanjian yang disepakati oleh para pembuat perdamaian serta menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi.³⁰ Efek dari pemeliharaan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

perdamaian dalam jangka pendek adalah membatasi jumlah kekerasan, tetapi juga menemukan bukti yang jelas bahwa konflik yang lebih sedikit kekerasan lebih mudah untuk berakhir secara meyakinkan beberapa tahun ke depan.³¹ Semakin banyak yang bersedia yang dikirim oleh PBB untuk misi pemeliharaan perdamaian, maka semakin banyak misi yang diberikan mandat yang kuat, semakin besar efek pengurangan konflik.

Definisi Operasional pengiriman pasukan Indonesia yang dikenal dengan Kontingen Garuda (Konga) XXIII-A, tidak semata-mata untuk mewujudkan kepentingan negara Indonesia tetapi pengiriman Konga yang tergabung dalam misi UNIFIL didasari oleh mandat Resolusi DK PBB No. 1701, dalam operasi mandat DK PBB salah satunya yaitu, untuk gencatan senjata, dengan adanya operasi tersebut, hal itu secara perlahan menarik mundur seluruh pasukan Israel dari Lebanon Selatan secara paralel dan untuk mencapai perdamaian.

1.7.1.2. Mediator

Definisi Konseptual mediasi menurut Douglas, mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa di mana dalam sosok netral, sedangkan mediator, membantu para pihak berkomunikasi satu sama lain, bertukar pikiran masalah, dan menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri untuk sengketa mereka.³² Menurut Jay Folberg dan Alison Taylor, mediasi dapat di definisikan sebagai proses dimana pihak yang bertikai menegosiasikan penyelesaian mereka sendiri dengan bantuan yang tidak memihak. Secara sistematis mengisolasi

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

masalah yang disengketakan untuk menghasilkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka.³³

Definsi Operasional mediator adalah dapat tercapainya kesepakatan antara kedua belak pihak yang berkonflik untuk gencatan senjata guna mencapai perdamaian.

1.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.³⁴ Penelitian ini menjelaskan mengenai kontribusi Indonesia melalui Kontingen Garuda (KONGA) dalam misi UNIFIL di Lebanon selatan

1.7.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu penelitian ini adalah sejak tahun 2006-2010, yaitu kepentingan nasional negara Republik Indonesia yang bertujuan mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi UNIFIL untuk menjadi mediator untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian yang terjadi di Lebanon Selatan antara pasukan Hizbullah dengan Israel.

³³ *Ibid*

³⁴ Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET. Hlm: 11.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Indiantoro dan Supomo secara umum, mengklasifikasikan paradigma penelitian dalam 2 kelompok yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.³⁵ Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh).³⁶ Teknik pengumpulan data ada dua yaitu primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui bahan referensi lain baik melalui studi kepustakaan maupun yang penulis dapatkan melalui media massa, dan dokumen resmi yang diperoleh dari Instansi resmi.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif karena berupa kasus-kasus, artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang terkait. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁷ Analisis kualitatif yang

³⁵ Metodologi Penelitian Bisnis. 2019. <http://www.univpgri-palembang.ac.id/perpus-fkip/Perpustakaan/Empiricism/Metode%20Penelitian%20Bisnis%20Edisi%202%20Normal%20bab%201.pdf>. Hlm 10. Diakses 08 Juni 2019.

³⁶ J. Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya. hlm 4.

³⁷ Silalahi, U. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.

digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, menyajikan data, melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari konseptualisasi dan operasionalisasi definisi, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi kumpulan data pendukung penelitian dan penjelasan lengkap kerangka pemikiran penelitian. Yang menjelaskan tentang upaya Kontribusi Indonesia melalui Kontingen Garuda / UNIFIL dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan pada tahun 2006-2010.

BAB III kumpulan data pendukung penelitian dan analisis hasil pengumpulan data penelitian beserta penjelasan lengkap kerangka pemikiran penelitian. Tentang kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

BAB IV adalah kesimpulan penelitian. Kesimpulan berisi sintesis pemikiran mulai dari BAB I, metodologi penelitian, sampai dengan BAB III, analisis data dan kerangka pemikiran penelitian.